

ANALISIS PENGEMBANGAN INDUSTRI DI KABUPATEN BEKASI TAHUN 2010-2014

Rr. Nila Indrasari

Magister Ilmu Administrasi Universitas Nasional

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengembangan industri di Kabupaten Bekasi tahun 2010-2014, dimana dalam kebijakan industri nasional menyatakan bahwa prinsip kebijakan pengembangan industri harus mendorong pertumbuhan industri serta peningkatan daya saing industri nasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu deskriptif analisis, karena peneliti bukan hanya mendeskripsikan apa yang terjadi, tetapi juga menjelaskan mengapa gejala tersebut terjadi. Data yang digunakan untuk analisis pada penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data time series. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara gabungan, yaitu deskriptif dan analisis data sekunder dengan membandingkan antar tahun, antar lapangan usaha, antar subsektor, dan antar daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bekasi merupakan daerah potensi industri dan telah terjadi pengembangan dan pendalaman industri, baik pada industri berteknologi tinggi, sedang, dan rendah. Industri kategori teknologi rendah dan sedang, kandungan bahan baku impor yang digunakan untuk proses produksi relatif rendah dan mengalami penurunan. Dengan adanya pengembangan dan pendalaman, serta peningkatan bahan baku lokal akan menghasilkan industri strategis, serta akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan nilai tambah di sektor industri sehingga kontribusi PDRB sektor industri pengolahan di Kabupaten Bekasi terus mengalami peningkatan. Dengan adanya pengembangan dan pendalaman industri di Kabupaten Bekasi, masyarakat/publik mendapat manfaat yang cukup besar. Peran pemerintah adalah dengan mempermudah memberikan izin dan menggalakkan agar industri menggunakan bahan baku lokal.

Kata kunci: kebijakan industri, pengembangan industri, pendalaman industry

Abstract

This study analyzed the development of industry in Bekasi Regency 2010-2014, where the national industrial policy said about principle of industrial development policy should encourage industry growth and increased competitiveness of national industries. This study

using descriptive analysis method, because researchers not only describes what is happening, but also explain why these problem happened. This study using secondary data for analysis and the secondary data is the data time series. Data analysis on this study using collaboration from descriptive method and secondary data analysis which is comparing data from year to year, business opportunities, sub-sectors and regions. Results of this study show that Bekasi District is an potential industry area and the industry has been developed, both in high-tech, medium, and low industries. Using of imported raw material in low and medium category of technology industry for production process is lower and decreased. With the development and deepening, and increasing of using local raw material will produce a strategic industry, increase the workforce and the value of industrial sector will be increase so the contribution of GDP in industrial sector in Bekasi District will be constantly increasing. With the development and deepening of industry in Bekasi District the public will get a great benefit. The role of government is ease to give permission and promote the industries for using local raw material.

Keywords: industrial policies, industrial development, deepening the industry

A. Pendahuluan

Dalam naskah Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019 disebutkan bahwa prinsip kebijakan pengembangan industri harus mendorong pertumbuhan industri serta peningkatan daya saing industri nasional. Dan dalam rangka pemberdayaan industri, antara lain dilakukan melalui penetapan industri strategis dan fasilitas industri strategis. Perindustrian nasional telah mendapatkan perhatian yang cukup pesat, mulai dari pengembangan sarana dan prasarana penunjang sampai pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang nantinya diharapkan dapat mengembangkan perindustrian nasional

dan mendorong pembangunan perekonomian Indonesia.

Mengingat perannya yang strategis, sektor industri khususnya industri manufaktur perlu ditingkatkan kinerjanya. Berbagai upaya perbaikan untuk mengatasi dampak krisis ekonomi terhadap kemerosotan kinerja sektor industri telah dilakukan, namun kinerja itu tampaknya belum sepenuhnya pulih. Hal ini disebabkan adanya permasalahan yang membutuhkan perhatian dan perlu segera diatasi.

Pembangunan ekonomi jangka panjang dapat merubah pusat kekuatan ekonomi dari pertanian menuju industri yang memiliki keunggulan kompetitif dan

komparatif. Indikator yang digunakan untuk mengukur struktur industri adalah distribusi dari jumlah unit produksi (perusahaan) yang ada dan total nilai output atau nilai tambah dari sektor industri menurut kelompok industri (subsektor). Karena semakin tingginya subsektor industri, berarti semakin tingginya diversifikasi produksi. Semakin maju industri manufaktur, semakin besar kontribusi output dari kelompok-kelompok industri berteknologi tinggi terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB).

Kebijakan Industri Nasional yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 merupakan suatu arahan dan kebijakan jangka menengah maupun jangka panjang, dalam rangka mempercepat proses industrialisasi untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional sekaligus mengantisipasi dampak negatif globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia dan perkembangan di masa yang akan datang. Salah satu wilayah di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, yang kontribusi sektor industrinya cukup besar adalah Kabupaten Bekasi. Jika dibandingkan dengan Kabupaten atau Kota lainnya di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi merupakan Kabupaten yang memiliki tingkat investasi dan penyerapan tenaga kerja tertinggi.

Dengan adanya potensi tersebut, maka akan diteliti apakah pengembangan industri di Kabupaten Bekasi sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan industri nasional yang tertuang dalam Kebijakan Industri Nasional, dimana tujuannya diantaranya adalah mampu meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian publik/negara Indonesia, pendalaman struktur industri dan mendiversifikasi jenis-jenis produksinya sehingga mampu menyerap tenaga kerja, sedangkan sasarannya adalah tumbuhnya industri yang mampu menciptakan/ menyerap lapangan kerja yang besar.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Jenis-jenis industri apa yang dikembangkan/ diperdalam oleh pemerintah Kabupaten Bekasi dalam upaya mengembangkan industri 2) Mengapa pemerintah Kabupaten Bekasi memilih jenis-jenis industri tersebut?

B. Metode Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara gabungan, yaitu deskriptif dengan interpretasi kritis dan analisis data sekunder dengan membandingkan antar tahun, antar lapangan usaha, antar subsektor, dan antar daerah. (Nugroho 2013:120). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Pada pendekatan kuantitatif, data sekunder yang diperoleh

dilakukan penghitungan, yaitu dengan dimasukkan dalam rumus - rumus sederhana yang telah ada yaitu dengan alat analisis *Location Quotient* (LQ) dan laju pertumbuhan, serta elastisitas tenaga kerja. Memperhatikan sumber data, Majchrack (1984:18) menamai metode ini *secondary analysis*. Apabila diposisikan dalam pendekatan kualitatif, analisis data seperti itu oleh Neuman (2013:573) termasuk dalam analisis ilustratif dimana peneliti menerapkan teori untuk situasi historis dan situasi sekarang. Dalam menganalisis data sekunder pada penelitian ‘Analisis pengembangan industri di Kabupaten Bekasi tahun 2010 sampai tahun 2014’, dimana analisis ini dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan data antar tahun, antar jenis industri, dan antar daerah selama 5 tahun, yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

Metode LQ digunakan untuk mengkaji kondisi perekonomian, mengarah pada identifikasi spesialisasi/basis kegiatan perekonomian. Sehingga nilai LQ yang sering digunakan untuk penentuan sektor basis dapat dikatakan sebagai sektor yang akan mendorong tumbuhnya atau berkembangnya sektor lain serta berdampak pada penciptaan lapangan kerja. (Robinson Tarigan, 2006:82)

Untuk mendapatkan nilai LQ menggunakan metode sebagai berikut :

$$LQ = \frac{\frac{\text{PDRB}}{\text{Xi}}}{\text{PDRB}}$$

Keterangan : xi = PDRB sektor industri pengolahan Kabupaten Bekasi

PDRB = PDRB seluruh sektor Kabupaten Bekasi

Xi = PDRB sektor industri pengolahan Provinsi Jawa Barat

PDRB = PDRB seluruh sektor Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan formulasi yang ditunjukkan dalam persamaan diatas, maka ada tiga kriteria penilaian LQ yang diperoleh, yaitu :

- a. Apabila $LQ = 1$ artinya peranan suatu sektor di Kabupaten Bekasi sama dengan peranannya di Provinsi Jawa Barat.
- b. Apabila $LQ > 1$ artinya peranan suatu sektor di Kabupaten Bekasi lebih besar dibandingkan dengan peranannya di Provinsi Jawa Barat.
- c. Apabila $LQ < 1$ artinya peranan suatu sektor di Kabupaten Bekasi lebih kecil dibandingkan dengan peranannya di Provinsi Jawa Barat

C. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan pengembangan industri nasional merupakan bagian kebijakan perindustrian yang diamanatkan dalam RPJMN 2015 - 2019 merupakan arah dari kebijakan pengembangan industri nasional tahun 2010-2014. Dimana prinsip kebijakan pengembangan industri harus mendorong pertumbuhan industri serta peningkatan daya saing industri nasional. Program pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah, yaitu kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan program pembangunan industri prioritas.

Kebijakan lintas sektoral dimaksudkan untuk mendorong kemajuan, pertumbuhan dan peningkatan daya saing industri.

Dalam pengembangan sarana dan prasarana industri, dilakukan melalui:

1. Standardisasi Industri, ditujukan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, menjamin keamanan, kesehatan dan keselamatan atas penggunaan produk industri, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengembangan industri hijau, dan mewujudkan persaingan sehat.
2. Infrastruktur Industri, dimana dua komponen utama infrastruktur industri yang perlu disediakan dalam rangka pembangunan industri nasional adalah energi dan lahan industri.

Tabel 4.1. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Bekasi Terhadap Pembentukan PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010-2014

Tahun	PDRB sektor Industri Pengolahan Kab Bekasi (Juta Rp)	PDRB sektor Industri Pengolahan Prov Jabar (Juta Rp)	Kontribusi (%)
2010	121,932,532.5	403,571,246.6	30.21
2011	129,759,733.9	426,184,947.5	30.45
2012	137,845,028.1	445,675,276.6	30.93
2013	147,163,365.2	477,714,072.3	30.81
2014	155,693,581.4	502,124,367.8	31.01

Sumber : BPS (diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa kecenderungan kontribusi sektor industri pengolahan Kabupaten Bekasi terhadap PDRB sektor industri pengolahan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 cukup besar, yaitu rata-rata sebesar 30,68 persen, dimana pada tahun 2014 menunjukkan kontribusi yang tertinggi (sebesar 31,01 persen), yang berarti PDRB sektor industri di Provinsi Jawa Barat banyak disumbang oleh PDRB industri pengolahan dari Kabupaten Bekasi.

Tabel 4.2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Bekasi Terhadap Pembentukan PDRB Kabupaten Bekasi, Tahun 2010-2014

Tahun	PDRB Sektor Industri Pengolahan Kab Bekasi (Juta Rp)	Total PDRB Kab Bekasi (Juta Rp)	Kontribusi (%)
2010	121.932.532,5	154.347.802,0	79,00
2011	129.759.733,9	164.538.843,0	78,86
2012	137.845.028,1	175.279.801,0	78,64
2013	147.163.365,2	186.479.889,5	78,92
2014	155.693.581,4	197.018.595,1	79,02

Sumber : BPS (diolah)

dilihat besarnya kontribusi sektor industri pengolahan di tingkat Kabupaten Bekasi terhadap total PDRB seluruh sektor di Kabupaten Bekasi, tabel di atas menunjukkan bahwa besarnya kontribusi sektor industri pengolahan Kabupaten Bekasi terhadap total PDRB Kabupaten Bekasi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sangat besar, yaitu rata-rata sebesar 78,89 persen, dimana pada tahun 2014 mencapai 79,02 persen, yang berarti sektor industri pengolahan menyumbang hampir 80 persen total PDRB seluruh sektor di Kabupaten Bekasi.

Dari uraian diatas, menunjukkan bahwa tiap tahunnya sektor industri pengolahan memberikan kontribusi positif baik terhadap PDB Nasional, PDRB Provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten Bekasi, dimana tiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang cukup baik, yang tentunya hal tersebut akan berdampak pada peningkatan perekonomian Kabupaten Bekasi.

Menurut kriteria *United Nations for Industrial Development Organization*, negara dengan kontribusi sektor industri

terhadap PDB kurang dari 10% disebut negara non industri, negara dengan kontribusi sebesar 10-20% termasuk dalam kelompok negara dalam proses industrialisasi, negara dengan kontribusi sebesar 20-30% termasuk kelompok negara semi industri, sedangkan kelompok negara industri memiliki kontribusi lebih dari 30% (Lincoln Arsyad, 1999:17). Berdasarkan hal tersebut, Kabupaten Bekasi yang memiliki kontribusi industri terhadap total PDRB Kabupaten Bekasi di atas 80 persen, berarti termasuk kelompok Kabupaten industri.

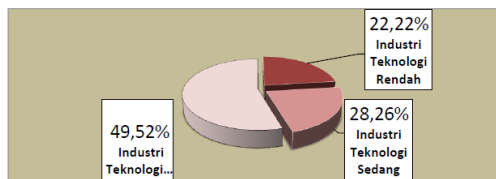
Tabel 4.3. Nilai *Location Quotient* (LQ) PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Bekasi Terhadap Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010-2014

Tahun	PDRB Sektor Industri Pengolahan Kab Bekasi (Juta Rp)	Total PDRB Kab Bekasi (Juta Rp)	PDRB Sektor Industri Pengolahan Prov Jabar (Juta Rp)	Total PDRB Prov Jabar (Juta Rp)	LQ
2010	121.932.532,5	154.347.802,0	403.571.246,6	906.685.760,4	1,77
2011	129.759.733,9	164.538.843,0	426.184.947,5	965.622.061,1	1,79
2012	137.845.028,1	175.279.801,0	445.675.276,6	1.028.409.739,5	1,81
2013	147.163.365,2	186.479.889,5	477.714.072,3	1.093.585.505,0	1,81
2014	155.693.581,4	197.018.595,1	502.124.367,8	1.148.948.816,8	1,81

Sumber : BPS (diolah)

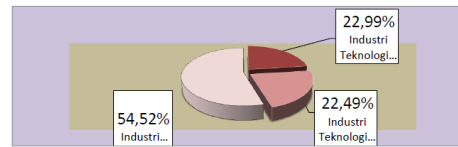
Dari hasil penghitungan menunjukkan bahwa nilai *Location Quotient* (LQ) sektor industri pengolahan Kabupaten Bekasi lebih besar dari 1 atau $LQ > 1$, menurut Tarigan (2006:82) hal tersebut di atas menunjukkan bahwa peranan sektor industri di Kabupaten Bekasi lebih menonjol daripada peranan sektor industri di Provinsi Jawa Barat, yang berarti bahwa di Kabupaten Bekasi surplus akan produk sektor industri pengolahan dan bisa mengekspornya ke daerah lain. Atas dasar $LQ > 1$ tersebut, secara tidak langsung

memberi petunjuk bahwa Kabupaten Bekasi memiliki keunggulan komparatif untuk sektor industri pengolahan. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sektor industri pengolahan di Kabupaten Bekasi LQ nya jauh di atas 1, hal tersebut karena pesatnya pertumbuhan industri di Kabupaten tersebut.



Gambar 4.1. Persentase Perusahaan Industri Pengolahan di Kabupaten Bekasi Menurut Kategori Teknologi, Tahun 2014

Gambar 4.1. Persentase Perusahaan Industri Pengolahan di Kabupaten Bekasi Menurut Kategori Teknologi, Tahun 2014 Pada gambar diatas, terlihat bahwa di Kabupaten Bekasi pada tahun 2014 persentase perusahaan industri teknologi tinggi terhadap total seluruh industri cukup besar, yaitu 49,52 persen, diikuti perusahaan industri teknologi sedang sebesar 28,26 persen, dan industri teknologi rendah sebesar 22,22 persen. Hal tersebut sesuai dengan pendekatan Habibienomics, dimana ekonomi Indonesia didorong oleh sektor-sektor industri berteknologi tinggi (industri strategis) yang memiliki daya saing dan nilai tambah tinggi.



Gambar 4.2. Persentase Tenaga Kerja Industri Menurut Kategori Teknologi, Tahun 2014

Gambar 4.2. Persentase Tenaga Kerja Industri Menurut Kategori Teknologi, Tahun 2014

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa tenaga kerja sektor industri banyak diserap oleh industri teknologi tinggi, hal tersebut karena perusahaan industri teknologi tinggi di Kabupaten Bekasi juga cukup banyak. Namun, walaupun jumlah perusahaan teknologi rendah lebih sedikit dari perusahaan industri sedang tetapi tenaga kerja pada industri teknologi rendah lebih banyak.

Dalam hal ini berarti Kabupaten Bekasi sudah sesuai dengan pendekatan Habibienomics, dimana ekonomi Kabupaten Bekasi didorong oleh sektor-sektor industri berteknologi tinggi (industri strategis) yang memiliki daya saing dan nilai tambah tinggi. Ketika industri *hitech* ini ditopang oleh industri pendukung (*supporting industry*) kecil/menengah dalam jumlah besar maka diharapkan efek kemakmuran yang menetes ke bawah (*trickle down effect*).

Menurut teori Alfred Weber (D. Marsudi, 1992:37) menyebutkan bahwa lokasi

industri sebaiknya diletakkan ditempat yang memiliki total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimal. Pada umumnya produsen lebih menyukai tenaga kerja yang berasal dari sekitar daerah lokasi industri. Karena biaya transportasi yang dikeluarkan untuk tenaga kerja di pabrik tersebut lebih murah, sehingga para buruh tidak menuntut upah yang terlalu tinggi.

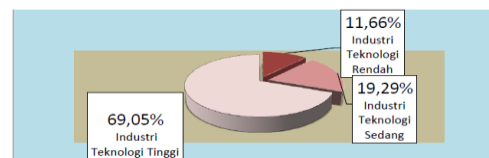
1. Pendalaman Dan Perluasan Industri di Kabupaten Bekasi

Pendalaman struktur industri di dalam negeri bisa dilihat dari struktur impor bahan baku, dan modal. (Nurimansyah Hasibuan, Ekonomi Industri, 2000 :262). Program pendalaman struktur industri ditujukan untuk meningkatkan kandungan Nilai tambah hasil industry mengurangi ketergantungan impor barang hasil industry secara ekonomi, memperluas basis produksi industry nasional secara vertical dan horizontal termasuk mengembangkan industry baru dalam rangka mengisi rangkaian hulu-hilir yang masih kosong secara efisien

Strategi yang ditempuh pemerintah untuk mendukung pembangunan industri strategis diantaranya adalah mengembangkan industri hulu dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku. Sedangkan program

pendalaman struktur industri yang ditujukan untuk meningkatkan kandungan nilai tambah hasil industri dan mengurangi ketergantungan impor barang hasil industri secara ekonomis akan memperluas basis produksi industri nasional.

Secara garis besar industri yang masih menggunakan kandungan bahan baku yang berasal dari impor yang relatif cukup tinggi adalah pada industri kategori teknologi tinggi. Sedangkan industri kategori rendah kandungan bahan baku impor yang digunakan untuk proses produksi relatif rendah.



Gambar 4.3. Persentase Nilai Tambah Industri menurut Kategori Teknologi, Tahun 2014

Dari gambar diatas terlihat bahwa pada tahun 2014 di Kabupaten Bekasi persentase nilai tambah sektor industri teknologi tinggi terhadap total nilai tambah industri Kabupaten Bekasi cukup tinggi, yaitu sebesar 69,05 persen, disusul industri teknologi sedang dan teknologi rendah.

Bila melihat uraian diatas, maka jelaslah bahwa pengembangan dan pendalaman industri yang terjadi di Kabupaten Bekasi mempunyai daya tarik yang luar biasa. Artinya, sektor industri pengolahan khususnya industri besar dan sedang bisa menarik sektor lain yaitu sektor perdagangan dan jasa serta mampu

menyerap tenaga kerja dan menghasilkan nilai tambah yang menyumbang cukup banyak PDRB di Kabupaten Bekasi.

Dari hasil penelitian, diperoleh gambaran potensi besar yang ada di Kabupaten Bekasi ada di sektor industri pengolahan, baik industri dengan kategori teknologi rendah, sedang, dan tinggi. Khusus untuk kategori teknologi tinggi, Kabupaten Bekasi mempunyai potensi besar pada industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, industri komputer, barang elektronik, dan optik, serta industri kendaraan bermotor, trailer, dan semi trailer. Dan untuk industri dengan kategori teknologi sedang, Kabupaten Bekasi punya potensi besar pada industri karet, barang dari karet, dan plastik, serta industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya, serta industri dengan kategori teknologi rendah Kabupaten Bekasi punya potensi besar pada industri tekstil, industri pakaian jadi, dan industri percetakan. 19

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bekasi harus bisa mendorong industri yang komposisi bahan baku impornya rendah untuk dikembangkan. Selain itu pemerintah juga perlu memberi bantuan permodalan, teknologi dan mempermudah izin untuk industri tersebut. Misalnya untuk industri pengolahan karet, garmen, dan industri kayu. Dengan adanya pendalaman struktur industri diharapkan industri yang ada tidak lagi tergantung

dengan bahan baku impor dan tidak terjadi kelangkaan bahan baku.

Arah kebijakan industri nasional, khususnya di Kabupaten Bekasi juga diharapkan mampu memayungi sektor industri melalui pengembangan kawasan industri khusus misalnya melalui kebijakan kawasan kluster industri. Dengan demikian pengembangan sektor industri tidak menjadi terkotak-kotak karena batasan-batasan birokrasi namun justru dituntut agar sinergi dengan instansi yang terkait dalam pengembangan sektor industri yang dapat dikembangkan.

Kesesuaian pengembangan sektor industri pengolahan di Kabupaten Bekasi dengan arah Kebijakan Industri Nasional yaitu

- a. Industri di Kabupaten Bekasi yang dikembangkan merupakan industri strategis, yaitu yang menghasilkan nilai tambah tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat
- b. Dengan Adanya pemngembangan industry di Kabuten Bekasi, selain menghasilkan nilai tambah yang cukup tinggi juga mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.
- c. Beberapa industry sudah dilakukan pendalaman struktur industry dimana sudah terjadi pengurangan jkandungn bahan baku impor dan meningkatkan bahan baku dalam negeri

- d. Beberapa industry yang dikembangkan merupakan industry dengan kategory teknologi

Jadi, dengan adanya pengembangan industri di Kabupaten Bekasi masyarakat/publik mendapat manfaat yang cukup besar. Peran pemerintah dalam pengembangan industri adalah dengan mempermudah memberikan ijin dan menggalakkan agar industri menggunakan bahan baku lokal.

Industri yang dikembangkan di Kabupaten Bekasi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah :

- a. Industri dengan kategori teknologi tinggi (industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, industri komputer, barang elektronik, dan optik, serta industri kendaraan bermotor, trailer, dan semi trailer)
- b. Industry dengan kategori teknologi sedang (industry karet, barang dari karet dan plastik serta industry barang logam.
- c. Industri dengan kategori teknologi rendah (industry tekstil, industry pakaian jadi dan industry percetakan.

D. PENUTUP

1. Kabupaten Bekasi mengembangkan industri tersebut karena industri tersebut menghasilkan nilai tambah yang cukup besar dan menyerap tenaga kerja yang cukup besar.

2. Industri di Kabupaten Bekasi yang telah dilakukan pendalaman industri diantaranya adalah industri makanan, kayu dan barang dari kayu, industri kertas dan barang dari kertas, serta industri furniture, dimana kandungan bahan baku lokal pada industri tersebut relatif rendah.

3. Nilai *Location Quoitient* (LQ) sektor industri pengolahan Kabupaten Bekasi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 lebih besar dari 1 atau $LQ > 1$, hal ini berarti dari segi pendapatan, sektor industri pengolahan di Kabupaten Bekasi merupakan sektor basis yang lebih tinggi perbandingannya atau tingkat spesialisasinya dengan sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Barat.

4. Dengan adanya pengembangan industri di Kabupaten Bekasi masyarakat /publik mendapat manfaat yang cukup besar. Peran pemerintah dalam pengembangan dan pendalaman industri adalah dengan mempermudah memberikan ijin dan menggalakkan agar industri menggunakan bahan baku lokal.

Pemerintah Kabupaten Bekasi agar mempromosikan dan menghimbau kepada perusahaan industri agar dalam proses industrinya untuk menggunakan bahan baku lokal khususnya bahan baku yang berasal dari sektor primer/sektor pertanian yang berasal dari dalam negeri/domestik.

5. Pemerintah Kabupaten Bekasi agar menghimbau perusahaan industri di Kabupaten Bekasi lebih memprioritaskan penyerapan tenaga kerja yang berasal dari wilayah Kabupaten Bekasi sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Sehingga dengan adanya pengembangan industri di Kabupaten Bekasi juga berdampak bagi masyarakat sekitarnya, yaitu bisa mengangkat perekonomian bagi masyarakat di Kabupaten Bekasi.

6. Peran Pemerintah dalam pembangunan industri strategis yang dilakukan melalui pengaturan kepemilikan, penetapan kebijakan, pengaturan perizinan, pengaturan produksi, distribusi, dan harga, serta pengawasan agar lebih ditingkatkan dalam pelaksanaannya.

Daftar Pustaka

- Tambunan, Tulus. 2001. *Industrialisasi di Negara Berkembang Kasus Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____, Tulus. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 23
- Tarigan, Robinson. 2006. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Ghalib Rusli, 2005. *Ekonomi Regional*, Bandung: Pustaka Ramadhan
- Sumanto, 2013. *Hubungan Industrial*. Yogyakarta: CAPS (*Center of Academic Publishing Service*)
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta
- _____, 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV. Alfabeta
- John Creswell, 2016, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Ed. Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- J. Rachbini, Didik. 1999. *Diagnosa Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan
- Newman, W. Lawrence. 2013. *Metodologi Penelitian Sosisl: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Jakarta: PT. Indeks

- Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Hasibuan, Nurimansyah. 2000. *Ekonomi Industri, Persaingan, Monopoli dan Regulasi*. Jakarta: LP3ES.
- Nasir M. 2001. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia
- Indonesia 24 Vrendenbregt J. 1980. *Metode Dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Nugroho R. 2013, *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Majchrack A.1984. *Methods For Policy Research*. London: Sage
- Todaro, Michael. 2000. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*. Jakarta : LP FEUI.
- Budiman, Arief. 1996. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kementerian Perindustrian, *Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035*
- Kementerian Perindustrian, *Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019*
- BPS Pusat, 2015. *Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2011-2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- BPS Provinsi Jawa Barat, 2014. *Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha 2010-2014*. Bandung: Badan Pusat Statistik Jawa Barat
- _____, 2015. *Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha 2011-2015*. Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat 25
- BPS Kabupaten Bekasi, 2014. *Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2014*, Bekasi: BPS Kabupaten Bekasi
- _____, 2015. *Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2015*, Bekasi: BPS Kabupaten Bekasi
- BPS Provinsi Jawa Barat, 2014. *Statistik Daerah Provinsi Jawa Barat 2014*, Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat
- _____, 2015. *Statistik Daerah Provinsi Jawa Barat 2015*, Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat
- BPS Kabupaten Bekasi, 2015. *Statistik Daerah Kabupaten Bekasi 2015*, Bekasi: BPS Kabupaten Bekasi
- Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas, S. Alisyahbana Armida, 2014. *Arah Kebijakan Dan Strategi Percepatan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia*
- Kusumantoro (2009) *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan, Disparitas Dan Spesialisasi Industri Kabupaten/ Kota Di Jawa Tengah* <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak/article/view/1463/1588> (diakses tanggal 23 Agustus 2016)

Awat, *Pengembangan posisi strategis perindustrian nasional dengan fondasi hukum,*

<http://www.awwatchforum.com/wp/>,
(diakses tanggal 20 Agustus 2016)

Gloria, *Industrialisas,*
<https://candygloria.wordpress.com>,
(diakses tanggal 20 Agustus 2016) 26

Irvan, *Pengertian, definisi ,macam, jenis dan penggolongan industri di Indonesia,*
<http://organisasi.org>, (diakses pada tanggal 21 Agustus 2016)

Jurnal Nasional: Kementerian
Perindustrian, *Maju Mundur Industri Strategis,*

<http://www.kemenperin.go.id/artikel>,
(diakses tanggal 21 Agustus 2016)
(diakses tanggal 19 Agustus 2016).